

Teori Media-Marxist: Sebuah Pengantar

Zulfebriges

ABSTRAK

Teori Media-Marxist mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Media dianggap memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Sementara, khalayak media sendiri lebih sering menegaskan dan mengontekskan kerangka tersebut karena ketidaksiapan menghadapi sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten. Bertitik tolak dari asumsi ini, maka teori Media-Marxist menawarkan cara pandang baru untuk menganalisis media dengan sejumlah konsep kunci: media sebagai cara produksi, media sebagai amplifier, hegemoni ala Gramsci, sampai pada text-reading ala Stuart Hall. Kendati demikian, sejumlah hal harus dicermati dalam penerapan teori Media-Marxist pada riset-riset media. Lyle mendefinisikan sembilan kelemahan teori Media-Marxist—beberapa di antaranya bersumber dari keyakinan bahwa dinamika masyarakat digerakkan sepenuhnya oleh perjuangan kelas, dan bahwa konflik senantiasa harus diselesaikan melalui cara-cara revolusioner.

1. Pendahuluan

Pendekatan *Neomarxist* merupakan pendekatan yang umum digunakan oleh teorisi media pada akhir 60-an sampai awal 80-an. Walaupun pengaruh *Marxist* kurang dominan, tapi masih tetap tersebar luas. Istilah *Marxist* sendiri memiliki berbagai *term* lain seperti : *critical* dan *radical*. Di Eropa, pendekatan *marxist* terhadap media massa dan budaya (sering disebut *cultural studies*) dominan pada pertengahan 1960-an sampai pertengahan tahun 1980-an.

Secara umum dapat dikatakan, pendekatan *Marxian* terhadap pengaruh media bergantung pada pengertian dan elaborasi tentang ideologi. Dalam literatur *Marxist*, istilah ideologi secara umum bermakna negatif, merujuk pada ideologi dominan yang mendukung kepentingan kelas dominan dan dijadikan alat untuk mempertahankan *status quo* (Underwood, 2003).

Tulisan ini bertujuan menjelaskan beberapa pendekatan dari pemikir *Neomarxist* terhadap media. Rujukan yang digunakan berasal dari tulisan Daniel Chandler ditambah beberapa tulisan dari Douglas Kellner, Stuart Hainsworth, Stuart Hall, dan beberapa tulisan lain (sebagian tulisan tidak mencantumkan nama penulisannya). Bahan ini (tulisan Daniel Chandler) merupakan materi kursus bagi *undergraduate* yang berminat tentang *media education*. Menurut Chandler, hal terpenting untuk memahami teori *Media Marxist* adalah mengetahui konsep-konsep kunci *Marxist* yang digunakan untuk menganalisis media massa.

Teori *Marxist* menekankan pada peran media massa yang cenderung mempertahankan *status quo*, kontras dengan teori media massa liberal pluralis yang menekankan pada peran media yang memiliki kebebasan berbicara (tidak selalu pro *status quo*). Munculnya *Neomarxist* dalam ilmu sosial sendiri merupakan reaksi terhadap model

fungsionalisme tentang masyarakat. Fungsionalisme, menurut Veeger (1985:196), menyoroti struktur-struktur dan gejala sosial dari segi konsekuensi terhadap kehidupan bersama, supaya pihak yang berkepentingan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam integrasi, kesatuan, keseimbangan, dan adaptasi masyarakat. Model fungsionalisme menggambarkan lembaga sosial sebagai fungsi kohesif dalam sebuah sistem sosial budaya yang saling berhubungan. Model ini tidak memperhitungkan potensi-potensi konflik yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi fokus utama pada teori Marxisme. Mengutip pendapat Gurevitch, Chandler menjelaskan perbedaan tajam kedua model di atas.

Kaum pluralis memandang masyarakat sebagai kompleks kepentingan dan kelompok yang bersaing, tidak ada satu pun di antaranya yang menjadi dominan. Organisasi media dipandang sebagai sistem organisasi yang terkunci dan menikmati otonomi yang sangat besar dan bebas dari pengaruh negara, partai politik, dan kelompok penekan. Kontrol media ada dalam genggamannya sekelompok elit manajer yang otonom, yang memiliki derajat profesionalisme tinggi dalam mengelola media. Ada sebuah simetri antara institusi media dan khalayaknya, yang dalam kata-kata McQuail dinyatakan sebagai berikut, “*Relationship is generally entered into voluntarily and on apparently equal term ...khalayak terlihat mampu memanipulasi media dengan berbagai cara sesuai kebutuhan dan disposisi mereka serta memiliki akses terhadap –Halloran menyebutnya– ‘nilai plural masyarakat’, yang memungkinkan mereka melakukan konformitas, mengakomodasi, atau menolak.*”

Kontras dengan teori Liberal, *Marxisme* memandang masyarakat sebagai suatu dominasi kelas; media adalah bagian dari arena pertarungan ideologi berbagai pandangan kelas, meskipun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Konsentrasi kendali semakin bertambah dalam monopoli kapital. Profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam dan serta menginternalisasikan norma budaya dominan.

Media memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Khalayak media sendiri kadang-kadang menegaskan dan mengkontekstkan kerangka tersebut—mereka berada dalam posisi tidak siap terhadap sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten.

2. Basis dan Superstruktur: Konsep-Konsep Kunci *Media-Marxist*

Marx membagi masyarakat menjadi basis ekonomi dan superstruktur yang terdiri dari level legal politik dan level ideologi. Hubungan antara keduanya dicirikan oleh *determination in the last instance* oleh basis ekonomi. Terdapat ‘otonomi relatif’ superstruktur terhadap basis dan aksi timbal balik antara basis dan superstruktur. Masalah yang muncul dengan menggunakan metode ini adalah penjelasan proses reproduksi cenderung bersifat deskriptif ketimbang teoretik. Marx percaya bahwa negara merupakan mesin represi yang menjamin dominasi kelas penguasa terhadap kelas buruh/pekerja. Oleh Althusser, elemen represif ini disebut sebagai *state apparatus* yang terdiri dari pemerintahan, administrasi, tentara, polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain. Selain itu, negara juga memiliki *ideological state apparatuses* yang terdiri atas agama, pendidikan, keluarga, media, dan budaya (Underwood, 2003).

Ekonomisme (sering juga disebut sebagai ‘Marxisme vulgar’) merupakan salah satu istilah kunci dari ‘Marxisme Klasik’ atau ‘Marxisme Ortodoks’ (fundamentalis). Dalam ekonomisme, basis ekonomi masyarakat dianggap menentukan apa pun dalam superstruktur yang meliputi kesadaran politik, sosial, dan intelektual. Ekonomi merupakan penyebab dasar fenomena sosial (disebut juga sebagai teori materialisme atau dalam versi Marxis dikenal sebagai ‘materialisme sejarah’). Ekonomisme berhubungan dengan determinisme teknologi.

Penelitian media massa dalam tradisi ini menginterpretasikan ‘industri budaya’ dalam istilah determinasi ekonomi. Sesuai dengan pandangan ini, “isi media massa dan makna yang terkandung

dalam pesan, terutama ditentukan oleh basis ekonomi organisasi di mana isi media dan maknanya dihasilkan” (Curran *et.al* 1982:18, dikutip Chandler). Konsekuensinya, organisasi media komersial harus memenuhi kebutuhan pengiklan dan menghasilkan produk yang memaksimalkan khalayak (dosis yang sangat banyak tentang seks dan kekerasan). *Term* ‘industri budaya’ menggambarkan keterkaitan antara aspek ekonomi dan budaya yang banyak dikaji oleh perspektif Kritis tentang budaya massa dan komunikasi. Studi tentang masyarakat konsumtif dipengaruhi oleh analisis Teori Kritis tentang kebutuhan, konsumsi, periklanan, dan kapitalisme konsumen (Kellner, tanpa tahun).

Menurut Lazarsfeld dan Merton, media massa, selain melakukan fungsi informatif dan hiburan, juga melakukan fungsi pengukuhan norma-norma sosial serta memberikan penganugerahan status. Misalnya, jika seseorang sering dijadikan narasumber oleh media, maka orang tersebut akan menjadi terkenal (Wright, 1985:16-17). Karena media memiliki beberapa fungsi yang sangat vital, timbul kekhawatiran masyarakat bahwa media berpotensi untuk memanipulasi orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Media juga bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kepentingan tertentu untuk menjamin ketundukan masyarakat pada *status quo* sosial dan ekonomi - *rulling class* menurut istilah *Marxisme* – yang akhirnya akan membungkam kritik sosial dan kemampuan khalayak untuk berpikir kritis (Wright, 1985:172).

Lembaga media juga memiliki penghasilan yang dikendalikan oleh lembaga politik, pemilik modal, atau negara terhadap *middle ground* atau *heartland* yang berasal dari konsensus umum. Model super struktur/basis yang diterapkan pada kajian media dihubungkan dengan kepemilikan dan kontrol media. Pandangan ini dikritik oleh *Marxist* Althusserian yang mengusulkan ”otonomi relatif dari superstruktur yang respek terhadap basis.... (dan) tindakan timbal-balik superstruktur pada basis” (Chandler mengutip Lapsley dan Westlake 1988:5). Sesuai dengan pandangan ini, media massa relatif otonom dari determinasi ekonomi. Di bawah

pengaruh Althusser, Stuart Hall dan *Marxist* ‘kulturalis’ yang lain, mereka menolak formulasi superstruktur/basis dan meyakini adanya dialektika antara - apa yang dikatakan Marx – *social being* dan *social consciousness*.

2.1 Media sebagai Cara Produksi

Dalam istilah klasik *Marxist*, media massa merupakan suatu cara produksi yang dalam masyarakat kapitalis merupakan milik kelas penguasa. Menurut *Marxist* Klasik, media massa menyebarkan gagasan dan pandangan dunia kelas penguasa dan menolak gagasan-gagasan alternatif. Media massa berfungsi untuk menghasilkan *false conscious* (kesadaran semu) pada kelas pekerja. Produk-produk media merupakan cerminan nilai-nilai kelas penguasa yang mengabaikan keragaman nilai-nilai dalam kelas penguasa dan dalam media itu sendiri, serta kemungkinan bacaan oposisi tandingan bagi khalayak media.

2.2 Media dan Ideologi

Kunci utama teori *Marxist* adalah ‘materialis’ yang menentukan kesadaran makhluk sosial. Sesuai dengan pandangan ini, posisi ideologi adalah fungsi dari posisi kelas dan ideologi dominan dalam masyarakat adalah ideologi dari kelas dominan. Hal ini berbeda dengan pandangan ‘idealis’ yang menekankan pada kesadaran. *Marxist* sendiri berbeda pandangan dalam hal ini: beberapa menginterpretasikan hubungan antara wujud sosial dan kesadaran sebagai determinasi langsung. Sementara yang lain menekankan hubungan dialektika.

Dalam *Marxisme* fundamentalis, ideologi dipandang sebagai kesadaran semu yang merupakan hasil dan emulasi ideologi dominan. Media massa berfungsi menyebarkan ideologi dominan, yaitu nilai-nilai kelas yang memiliki dan mengendalikan media. Namun, Althusser menolak anggapan tentang kesadaran semu, dan menekankan bahwa ideologi adalah medium kita untuk mengalami dunia. *Marxisme* Althusserian menekankan *irreducibility* dan kematerialan sebuah ideologi. Menurut Althusser, ideologi

memiliki dua fungsi. *Pertama*, ideologi merepresentasikan hubungan imajiner antara individu dengan realitas. *Kedua*, ideologi memiliki eksistensi material.¹ Jelasnya, teoretisi *Marxis* setuju bahwa media massa memiliki kekuatan ideologi. Tetapi, mereka tidak setuju mengenai sifatnya.

2.3 Media sebagai *Amplifier*

Dalam analisis media *Marxis*, institusi media dianggap sebagai wujud yang terikat pada struktur kekuasaan, dan sebagai konsekuensinya bertindak melalui kerjasama dengan lembaga yang dominan dalam masyarakat. Media menampilkan pandangan lembaga yang dominan, bukan sebagai satu di antara sejumlah perspektif alternatif—tetapi sebagai pusat perspektif yang mendominasi.

Menurut Curran *et al.* (seperti dikutip Chandler), sebagian besar peneliti dalam tradisi *Marxis* di Inggris: “Mereka menguji dampak media massa dalam situasi di mana komunikasi bermedia sangat berpengaruh yang didukung oleh lembaga-lembaga lain, seperti polisi, peradilan, dan sekolah. Kekuatan media digambarkan sebagai memperbarui, menyaring, dan memperluas predisposisi yang ada yang merupakan budaya dominan, tidak untuk menciptakannya.”

2.4 Pembentukan Subjek dalam Diskursus *Media-Marxist*

Teoretisi *Marxis* membuat perbedaan yang khusus antara subjek dan objek. Tony Bennett mengatakan bahwa dialektika sejarah meliputi hubungan interaktif yang bersifat timbal-balik antara subjek (*human agents*) dengan objek (kondisi keberadaan mereka). Fiske membedakan ‘subjek’ sebagai berikut: individu dihasilkan oleh *nature*; subjek oleh kultur.”

Teori-teori tentang individu memusatkan pada perbedaan antara orang dan menjelaskan perbedaan ini sebagai *natural*. Teori-teori tentang subjek, di lain pihak, memusatkan pada pengalaman umum orang dalam masyarakat sebagai wujud cara yang paling produktif untuk menjelaskan siapa kita.

“Subjek adalah konstruksi sosial, bukan sesuatu yang alami” (Chandler, tanpa tahun). Althusser menolak anggapan kaum humanis tentang individu sebagai *self-conscious*, wujud otonom yang tindakannya harus dijelaskan dalam *term* kepercayaan personal, tujuan, preferensi, dan seterusnya. Menurut Althusser (Kerry Braye, 2002), identitas individu dipengaruhi oleh identifikasi terhadap nilai mapan yang berasal dari institusi agama dan media. Negara bukan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kekuatan represif yang beroperasi untuk kepentingan kelas penguasa, tetapi juga antara *repressive state apparatus*, yakni pemerintah, polisi, dan administrasi yang berfungsi menggunakan kekerasan, dan institusi agama, keluarga, dan institusi mayor lainnya yang memiliki fungsi ideologi. Althusser menyebutnya *Ideological State Apparatuses* (ISA). Individu dapat menemukan identitas dirinya melalui serangkaian identifikasi terhadap ISA. Satu-satunya cara individu dapat menjadi subjek adalah dengan *subjecting* dirinya sendiri.

Althusser juga memperkenalkan konsep interpelasi yang digunakan untuk menjelaskan fungsi politik teks media massa. Subjek (pemirsa, pendengar, pembaca) dibangun oleh teks dan kekuatan media massa terletak dalam kemampuan mereka untuk memosisikan subjek sedemikian rupa hingga merepresentasikan realitas kehidupan sehari-hari. Ideologi berfungsi membentuk individu sebagai subjek. Melalui ISA, orang mendapatkan pemahaman tentang identitas dan realitas. Anggapan bahwa subjek manusia dibentuk oleh struktur yang ada sebelumnya adalah ciri umum strukturalisme, di mana subjektivitas ditentukan oleh struktur yakni: bahasa, hubungan keluarga, konvensi budaya, dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya (Chandler mengutip Lapsley & Westlake 1988: 8).

Anggapan Althusser tentang interpelasi memungkinkan teoretisi *Media Marxist* menjelaskan fungsi politik dunia teks media massa. Sebagai suatu struktur yang telah ada sebelumnya, teks menginterpelasi penonton sehingga membentuknya sebagai subjek (Lapsley &

Westlake, 1988 : 12). Menurut pandangan ini, subjek (pemirsa, pendengar, pembaca) dibentuk oleh teks. Kekuatan media massa, dengan demikian, terletak dalam kemampuannya untuk ‘posisi’ subjek sedemikian rupa sehingga representasi mereka mencerminkan realitas sehari-hari.

Herbert Marcuse menggambarkan kekuatan media massa yang cenderung menganggap khalayak sebagai korban yang pasif. Sementara, *Neomarxis* menganggap khalayak lebih aktif.

3. Ragam Perspektif

Teori *Media-Marxist*

Perbedaan-perbedaan mazhab pemikiran dalam teori *Media Marxist* menjadi bahan kajian para komentator. Michael Gurevitch dan koleganya menyebutkan tiga *contending paradigm* : strukturalis, ekonomi politik, dan kulturalis. *Marxisme* Althusserian termasuk ke dalam kelompok strukturalis. Analisis strukturalis yang mumi berfokus pada “artikulasi internal tentang sistem signifikasi media”.

Stuart Hall menampilkan pendekatan *Marxisme* kultural yang menganggap media massa sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran publik. Kulturalisme mengikuti strukturalisme Althusserian yang menolak ekonomisme. Namun, tidak seperti strukturalisme, kulturalisme menekankan pada pengalaman aktual kelompok dalam masyarakat dan mengontekstualisasikan media ke dalam suatu masyarakat yang dipandang sebagai *a complex expressive totality* (Chandler, mengutip Curran et.al 1982: 27). Masih menurut Curran, teoretisi Marxis berbeda dalam pertimbangan mereka tentang determinasi media massa dan sifat serta kekuatan ideologi-ideologi media massa.

3.1 Mazhab Frankfurt

Menurut Kellner,² Mazhab Frankfurt sangat berguna untuk menganalisis bentuk-bentuk budaya dan masyarakat karena berfokus pada *intersection* antara teknologi, industri budaya, dan situasi ekonomi dalam masyarakat kapitalis

kontemporer. Mazhab ini menghasilkan model studi budaya dari kajian tentang media massa dan budaya. Melalui pendekatan lintas disiplin dan mengombinasikan kritik tentang ekonomi politik media, analisis teks, dan penerimaan khalayak, teori kritis berupaya mempelajari efek sosial dan ideologi budaya dan komunikasi massa, serta menganalisis hampir semua artefak budaya yang berasal dari media dan merupakan produk dari produksi massa ciri-ciri yang sama: komodifikasi, standarisasi, dan masifikasi.

Industri budaya memiliki fungsi yang khusus, yakni melegitimasi ideologi masyarakat kapitalis dan mengintegrasikan individu ke dalam kerangka sistem kapitalis. Mazhab Frankfurt menjadi sangat terkenal dengan teori *the totally administered society* atau *one dimensional society* yang menjelaskan tentang bertambahnya kekuatan kapitalisme pada semua aspek kehidupan sosial yang mengembangkan bentuk-bentuk baru kontrol sosial (*lihat Kellner*).³

Teori Kritis dianggap oleh Marxis Ortodoks sebagai revisionis disebabkan kritik mereka terhadap ekonomisme dan *crude materialism*, sebagian karena eklektisisme. Empat tokoh penting Mazhab Frankfurt adalah Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jurgen Habermasm, dan Max Horkheimer - *all committed marxist* - yang tergabung dalam *Institute for Social Research* yang didirikan pada tahun 1923 di Frankfurt. Mereka pindah ke New York pada tahun 1933. Istilah ‘kritis’ diciptakan oleh Horkheimer yang memiliki makna kritis terhadap ajaran di bidang sosial yang ada pada saat itu (Bertens, 1985:182).

Menurut Littlejohn (2001:226-229), teori kritis memiliki beberapa ciri. *Pertama*, ilmuwan teori kritis percaya bahwa sebuah keniscayaan untuk bisa memahami pengalaman hidup orang lain, harus dikaitkan dengan konteks tertentu. *Kedua*, berusaha menguji kondisi sosial untuk mengungkapkan struktur sosial yang timpang (misalnya antara kelompok *the have* dengan kelompok *the have not*). *Ketiga*, berusaha secara sadar untuk menggabungkan antara teori dengan tindakan. *Keempat*, ada perbedaan penting studi-studi kritis antara kaum strukturalis dan kaum

Poststructuralist. Bila kaum struktural mengajarkan bahwa kaum struktural yang menindas adalah sebuah kenyataan, meskipun tersembunyi dalam kesadaran banyak orang, maka kaum *Poststructuralist* menyatakan bahwa tidak ada realitas tunggal atau makna tunggal. Struktur yang menindas berlangsung terjadi dalam waktu yang sangat singkat. *Kelima*, banyak pendekatan kritis adalah Marxis, tetapi karena Marx sangat struktural dan teoretikal, kaum poststrukturalis menolak disebut *Marxist*. Juga, karena poststrukturalis menolak validitas teori, kadang-kadang mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam teori Kritis. *Keenam*, menurut Marxisme, praktik-praktik komunikasi merupakan hasil ketegangan antara kreativitas individu dengan batasan-batasan sosial terhadap kreativitas tersebut. Bila individu bebas menyatakan diri mereka secara jelas dan logis, maka kemerdekaan akan dapat dicapai—suatu hal yang sulit dicapai oleh masyarakat kelas bawah. *Ketujuh*, ideologi dalam pandangan teori kritis merupakan gagasan yang menstruktur realitas kelompok, sebuah sistem representasi atau makna yang mengatur bagaimana khalayak melihat dunia.

Mazhab Frankfurt dipengaruhi anggapan konservatif tentang ‘masyarakat massa’. Herbert Marcuse—Bapak Kiri Baru—dalam bukunya *One Dimensional Men*, menggambarkan berapa pokok pikirannya bahwa manusia adalah makhluk yang mendambakan kebahagiaan dan berhak atas kebahagiaan. Namun, realisasinya terhalang karena suasana represif yang ada di masyarakat. Yang menjadi penindas bukanlah antara manusia terhadap manusia yang lain, tetapi suatu sistem totaliter yang menguasai semua orang. Sistem totaliter yang dimaksud Marcuse adalah sistem teknologis (meliputi aparat produksi dan konsumsi, media massa dan publisitas periklanan, kelompok industri) yang merangkum seluruh realitas alamiah dan sosial dalam cengkeramannya dan tidak ada yang dapat mempengaruhi sistem tersebut. Keinginan manusia akan materi dan pemenuhannya mudah dilakukan. Namun keinginan yang muncul merupakan sesuatu yang memang dikehendaki oleh sistem. Produktivitas yang meningkat diiringi pola konsumerisme yang

meningkat pula (akibat media massa dan publisitas periklanan). Konsumsi yang besar pada akhirnya akan mempertahankan produktivitas (Bertens, 1985:203-208).

Hamelink (1983:7) mencatat beberapa dampak ‘mengerikan’ yang diakibatkan oleh—Hamelink menyebutnya—‘Agen Periklanan Transnasional’ yang menggunakan media massa. *Pertama*, iklan susu yang digambarkan di media sebagai sama baiknya dengan air susu ibu telah menyebabkan banyak ibu tidak mau lagi menyusui bayi-bayi mereka yang mengakibatkan tingginya angka kematian bayi. *Kedua*, iklan tentang krim pemutih kulit pernah sangat laris di Afrika Selatan yang mayoritas penduduknya berkulit hitam karena mereka dibuat percaya (akibat iklan di media) bahwa ‘cantik’ adalah kalau Anda memiliki kulit yang putih. *Ketiga*, tari Ramayana di Bali sampai harus ‘dimodifikasi’ agar sesuai dengan selera turis-turis asing yang melihatnya. *Keempat*, melalui iklan masif IBM, digambarkan bahwa suku Indian Navajo akan terlindungi identitas budayanya kalau mereka mau menggunakan mesin ketik yang menggunakan huruf Indian Navajo.

Menurut Marcuse, media massa membatasi *term-term* yang mungkin kita pikirkan tentang dunia. Sebagian orang di Amerika, misalnya, percaya bahwa kesuksesan hidup sangat ditentukan oleh apakah Anda berpendidikan *college* atau tidak. Kepercayaan ini muncul disebabkan pengaruh media massa, keluarga, dan sekolah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa mazhab ini sangat pesimistik terhadap media massa. Janet Wollacott menegaskan, media massa dan industri budaya memiliki peran dominasi ideologi yang menghancurkan individualisme borjuis dan potensi revolusi kelas pekerja.

3.2. Gramsci dan Hegemoni

Antonio Gramsci adalah salah seorang pemikir *Marxis* garda depan. Seperti Althusser, dia menolak ekonomisme dan menegaskan independensi ideologi dari determinisme ekonomi. Gramsci juga menolak materialisme mentah dan menawarkan versi *marxis* yang lebih humanis dan berfokus pada

subjektifitas manusia. Gramsci menggunakan istilah “Hegemoni” yang menandakan dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain (seperti hegemoni borjuis). Hegemoni tidak hanya merujuk pada kontrol ekonomi dan politik, tapi juga kemampuan kelas dominan untuk melindungi dominasi mereka terhadap kelas subordinat.

Menurut Stuart Hainworth (2000), teori hegemoni lahir dari ide dasar bahwa negara dan pemerintah, atau siapa pun, tidak dapat mengendalikan kelas atau struktur tertentu, kecuali dilakukan secara intelektual. Hegemoni merupakan kekuatan politik yang mengalir dari intelektual dan pemimpin moral, otoritas, atau konsensus yang berbeda dari kekuatan bersenjata. Hegemoni dimiliki oleh kelas penguasa yang berusaha untuk mempertahankannya dengan membentuk konsensus politik dan budaya melalui partai politik, sekolah, media, rumah ibadah, dan lain-lain. Sistem hegemoni dapat diklasifikasikan sebagai basis diktator proletariat sosial dan *the worker state*.

3.3 Stuart Hall dan *Marxist-Culturalist*

Berasal dari kelas menengah imigran Jamaika, Stuart Hall adalah seorang profesor sosiologi pada Open University yang menghidupkan kembali politik kiri Inggris tahun 1960 sampai dengan 1970. Stuart Hall (1997) menganggap media massa, selain mereproduksi interpretasi yang melayani kepentingan kelas penguasa, juga sebagai *field of ideological struggle*. Media massa merupakan cara kelompok *the have* mendapatkan dukungan dari *the have not* untuk mempertahankan *status quo*. Walaupun demikian, pengaruh atau dominasi *the have* terhadap *the have not* tidak dilakukan secara total, tidak berdasarkan kekuatan. Pengaruh ini juga bukan merupakan sebuah konspirasi, muncul berdasarkan ideologi yang dominan. Media massa, terutama televisi, biasanya meng-*encode* ideologi yang dominan. Sistem signifikansi media dipandang relatif otonom. ‘Berita’ memiliki peran krusial dalam memaknai kejadian-kejadian meskipun dipandang sekunder oleh *primary definer* yakni pemerintah dan lembaga yang lain.

Selain itu, media juga meneguhkan *consensual view point* dengan menggunakan idiom-idiom publik dan klaim-klaim tentang opini publik.

Dalam makalahnya yang berjudul *Encoding/Decoding*, Stuart Hall (1997) membuktikan bahwa ideologi dominan adalah sebuah *preferred reading* (bacaan rujukan) dalam teks media, tetapi tidak serta merta diterima oleh pembaca. ‘Situasi sosial’ pembaca/pendengar/pemirsa sangat berpengaruh terhadap makna yang dibentuk terhadap suatu teks. *Dominant reading* dihasilkan oleh seseorang yang berada dalam situasi sosial yang cenderung mengakomodasi *favour ‘preferred reading’*. *Negotiated reading* adalah versi dari ideologi dominan yang mencerminkan posisi sosial khalayak. Sedangkan *oppositional reading* dihasilkan oleh mereka dengan posisi sosial yang secara langsung berkonflik dengan *preferred reading*, yakni mereka yang memiliki kesadaran kritis terhadap ideologi dominan (lihat juga McNair, 1999:31).

3.4 Kekuatan Analisis *Marxist/Teori Kritis*

John Lyle (2000) menyebutkan beberapa kekuatan teori Media Kritis :

1. Bisnis-bisnis besar dan pemerintahan saling bekerja sama.
2. Keuntungan merupakan hal paling mendasar.
3. Dalam batas tertentu, media massa dikendalikan oleh kelompok bisnis besar dan pemerintah.
4. Banyak media massa yang tidak imajinatif, bersifat sensasional, dan *slanted* terhadap penguasa.
5. Teori Media Kritis mengajarkan agar orang bersikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Teori Kritis mengekspos mitos ilmu sosial yang bebas nilai. Perspektif Marxis mengarahkan perhatian kita terhadap isu kepentingan ekonomi dan politik media massa dan menelanjangi ketidaksetaraan sosial yang ditampilkan dalam media (media lebih berpihak pada *rulling class*). Marxisme juga membantu menempatkan teks me-

dia ke dalam format sosial yang lebih luas. Fokus pada sifat ideologi membantu kita mendekonstruksi nilai-nilai yang diterima begitu saja. Analisis ideologi membantu kita untuk mengekspos dan realitas yang ditawarkan dalam teks media sebagai *site of struggle* bagi makna ideologi serta membuka kemungkinan bacaan-bacaan yang berlawanan.

Teori Marxis menekankan pentingnya kelas sosial dan hubungannya dengan kepemilikan media dan interpretasi khalayak tentang teks media. Bila analisis isi dan semiotika memberikan pencerahan seputar isi media, teori Marxis menyoroti kondisi materi, produksi, dan resepsi media. Isu lain yang penting adalah perbedaan akses dan mode interpretasi yang dibentuk oleh pengelompokan sosial ekonomi. Penelitian *media Marxist* meliputi analisis representasi dalam media massa yang bertujuan untuk mengungkap muatan ideologi media tersebut.

4. Kritik terhadap Pendekatan Marxisme dan Media-Marxist

Marxism, seperti juga aliran-aliran filsafat lain, tidak lepas dari kritik. Ada banyak kritik yang dilontarkan. Mick Underwood (2003) mengkritik bahwa praktisi media gagal menunjukkan bagaimana media menopang kelangsungan hegemoni kapitalis dan sangat menekankan pada analisis tekstual. Selain itu, posisi khalayak media tidak diperhitungkan. Padahal, makna teks media yang terbentuk pada benak khalayak media sangat dipengaruhi oleh makna yang ‘diciptakan’ oleh khalayak itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada yang disebut sebagai ideologi dominan. Underwood (2003) menyatakan :

Some critics would argue that the working class do not conform because they subscribe to the dominant ideology, nor do the ruling class rule because they have succeeded in the struggle for hegemony. Rather, such critics argue, the working class conform because they need to keep their jobs and the ruling class rule because they are rich. From this point of view, wealth confers power and that's all there is to it. The ruling class dominate, not because they succeed in establishing

themselves in a position of ideological leadership, but because their wealth allows them, in all the various ways which are tediously familiar, to buy access to power. The subordinated classes are dominated, not because they are afflicted by some notional false consciousness, but because they need to survive and in order to survive they need to play by the rules set by those who run the game. (Sejumlah kritik berargumen bahwa kelas pekerja berkompromi bukan karena ideologi dominan. Demikian pula, kekuasaan kelas penguasa bukan ditentukan oleh keberhasilan mereka memenangkan pertarungan untuk hegemoni. Kritik-kritik tersebut berargumen, kelas pekerja berkompromi karena mereka perlu mempertahankan pekerjaan mereka, sementara kelas pekerja berkuasa karena mereka kaya. Dari sudut pandang ini, kekayaan memberikan kekuasaan, dan memang begitulah adanya. Kelas penguasa mendominasi, bukan karena mereka berhasil memapankan diri dalam sebuah posisi kepemimpinan ideologis, namun karena kekayaan mereka memungkinkan mereka, dalam beragam cara yang umum, untuk membeli akses pada kekuasaan. Kelas-kelas yang tersubordinasi didominasi, bukan karena mereka terpengaruh oleh kesadaran semu, namun karena mereka perlu mempertahankan hidup. Sementara untuk mempertahankan hidup, mereka perlu mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh mereka yang memimpin [permainan itu]).”

Pada tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat kritik tentang Marxisme pada tiga aspek: (1) kritik terhadap Teori Dialektika Materialisme, (2) kritik terhadap Teori Kelas, (3) kritik terhadap Teori Kritis.

4.1 Kritik terhadap Teori Dialektika Materialisme

Filsafat materialisme menyatakan bahwa dunia terdiri dari dan tergantung kepada materi. Kejadian apa pun dapat dijelaskan berlandas pada materi dan proses material “... *that everything is strictly caused by material*” (*Dictionary of Philosophy*, dikutip oleh Ramly, 2000:91). Marx menganggap dialektika materialisme sebagai keseluruhan proses

perubahan yang terjadi terus-menerus, tanpa ada yang mengantarai. Dari proses itu kemudian timbul kesadaran melalui proses konflik. Pergerakan dan perubahan materi terjadi terus-menerus menuju pada tingkatan yang lebih tinggi, melalui proses pertentangan-pertentangan, bukan melalui proses yang lamban (evolutif).

Klaim dialektika materialisme mendapat kritik dari seorang filosof, Baqir Shadr, yang menguraikannya secara rinci dalam salah satu bukunya *Falsafatuna* (terjemahan Indonesia). Beberapa kritik Baqir Shadr dapat diuraikan sebagai berikut (Shadr, 1981: 144 - 206):

1. Teolog mempercayai eksistensi yang terlepas dari materi, sedangkan materialisme mengingkari serta membatasi eksistensi pada bidang eksperimental tertentu saja. Sebab-sebab alami yang diungkapkan eksperimen dan dijangkau ilmu pengetahuan adalah sebab-sebab primer eksistensi, sementara alam diyakini sebagai satu-satunya eksistensi. Hal ini memunculkan pertanyaan: apabila kompatibilitas antara teologi dan materialisme adalah kompatibilitas penetapan dan penafian, aliran yang mana yang harus membuktikan posisi afirmatif atau penafiannya sendiri? Kedua mazhab harus membuktikannya. Materialisme harus membuktikan karena mereka tidak menjadikan proposisi metafisika sebagai subjek keraguan serta menafikan tanpa batas. Penafian mutlak, seperti juga afirmasi mutlak, sama-sama membutuhkan dalil. Jika, misalnya, dalam eksperimen ilmiah tidak mungkin ditunjukkan bahwa materi bukanlah ciptaan sebab imaterial. Menurut Shadr, pembuktian secara indera seperti itu tidak dapat dianggap sebagai dalil penafian, karena tiadanya sebab yang lebih tinggi di dalam alam empirik tidak membuktikan tidak adanya sebab tersebut dalam alam yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh pengalaman inderawi secara langsung.
2. Ide materialistis menganggap materi atau eksistensi sebagai titik sentral dalam filsafat *Marxis* yang menentukan pandangan *Marxis* tentang kehidupan dan membangun

pemahaman tentang realitas dan nilainya. Marx menganggap pengetahuan rasional sebagai hal yang mustahil serta menolak logika rasional yang terlepas dari pengalaman inderawi. Bila hal ini benar, maka muncul pertanyaan: bila kriteria ideasional manusia adalah indera dan pengalaman inderawi, maka informasi didapat melalui indera dan pengalaman inderawi. Jika indera dan pengalaman inderawi itu dianggap tentu benar selamanya dan mesti dianggap sebagai kriteria primer untuk menimbang ide dan pengetahuan, maka apakah hasil-hasil empirik ini juga benar? Apakah teori-teori yang berdasarkan pengalaman inderawi dapat dijamin benar selamanya? Di sini, Marxisme menghadapi dua bahaya: *pertama*, jika informasi berdasarkan pengalaman inderawi itu tak bebas dan kesalahan, maka gugurlah klaim pengalaman inderawi sebagai kriteria primer kebenaran dan pengetahuan; *kedua*, jika sebaliknya, maka *Marxisme* akan dihadapkan pada banyaknya teori-teori ilmiah yang berdasarkan indera dan pengalaman inderawi yang ternyata salah.

3. Menurut Marxisme, gerak merupakan hasil kontradiksi-kontradiksi kandungan internal materi. Kontradiksi-kontradiksi itu bergulat satu sama lain hingga menyebabkan terjadinya perkembangan materi secara terus menerus. Dengan kata lain, Marxisme menolak prinsip non kontradiksi dan menggunakan dialektika sebagai metode untuk memahami alam dan menempatkan ide materialistisnya ke dalam kerangka metode itu. Berdasarkan prinsip kontradiksi, pertentangan-pertentangan akan terus-menerus terjadi pada setiap hal. Karena pertentangan-pertentangan memunculkan gerak dan progresi, maka alam akan selalu dalam keadaan maju dan menjadi. Contoh: ide tentang eksistensi. Eksistensi ada dan merupakan tesis. Tetapi, eksistensi bukan sesuatu. karena bisa berarti segala sesuatu. Misalnya, lingkaran, segi empat, putih, tumbuhan, Dosen Fikom, dan lain-lain. Jadi, eksistensi bukan sesuatu yang pasti dan pada gilirannya tidak *maujud* (anti tesis). Ini

merupakan kontradiksi yang ada dalam ide tentang eksistensi. Kemudian muncul sintesis: eksistensi dan non eksistensi menghasilkan *maujud* yang tidak sepenuhnya *maujud*, yaitu menjadi bergerak. Namun di sini, Hegel telah mengacaukan ide tentang eksistensi dengan realitas objektif eksistensi tersebut. Konsep tentang eksistensi adalah ide tentang eksistensi dalam benak, bukan merupakan realitas objektif eksistensi. Ide tentang eksistensi dan realitas eksistensi adalah dua hal yang berbeda. Realitas eksistensi adalah tertentu dan terbatas, serta tidak terlepas dari atribut eksistensi. Sedangkan ide eksistensi merupakan konsep mental yang diambil dari eksistensi real tersebut.

4.2 Kritik Terhadap Teori Kelas

Pemikiran Karl Marx didasarkan pada sebuah praanggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Misalnya, keterasingan manusia merupakan hasil penindasan satu kelas oleh kelas yang lain. Untuk melepaskan keterasingan hanya bisa dilakukan melalui perjuangan kelas.

Marx tidak pernah mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud tentang kelas, tapi Lenin memberikan sebuah definisi kelas, yakni “Golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi.” Menurut Marx, guna memahami sejarah dengan segala perkembangannya, kita harus memperhatikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Dalam setiap masyarakat akan selalu ada kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai adalah kelas atas dan kelas yang dikuasai adalah kelas bawah. Pada masyarakat kapitalis — menurut Marx — terdapat tiga kelas: kaum buruh (hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dari laba), dan tuan-tuan tanah (hidup dari rente tanah). Kelas-kelas ini saling berlawanan satu sama lain. Kelas majikan memiliki pabrik, mesin, tanah; kelas buruh melakukan kerja bagi kelas majikan. Mereka terpaksa menjual tenaga kepada kelas pemilik yang menyebabkan kegiatan kerja bukan lagi milik

sendiri, tetapi menjadi milik majikan. Itulah dasar keterasingan dalam pekerjaan.

Berikut beberapa kritik Fran Magnis-Suseno (1999 :112 134) tentang Teori Perjuangan Kelas.


1. Apakah hanya kelas-kelas sosial ekonomi itu yang menjadi sebab perubahan sosial? Apakah afiliasi ideologis atau agama tidak dapat mempersatukan sekelompok orang meskipun terdiri dan pelbagai kelas sosial?
2. Apakah peran individu dan pemimpin kuat dalam sejarah tidak terlalu diremehkan? Dapatkah, misalnya, peran luar biasa Napoleon Bonaparte dipandang sebagai sekedar perpanjangan dan kepentingan kelas borjuis?
3. Betulkah bahwa pertentangan antara kelas-kelas sosial, terutama antara kelas atas dan kelas-kelas bawah sedemikian tak terdamaikan hingga perubahan sosial hanya dimungkinkan melalui revolusi? Apakah perbaikan sosial yang sungguh-sungguh tidak dapat tercapai tanpa revolusi, jadi, tanpa penggulingan struktur kekuasaan yang ada? Apakah kepentingan borjuis dan proletariat tidak mungkin didamaikan?
4. Apakah benar bahwa struktur kekuasaan politik selalu mencerminkan struktur kekuasaan ekonomis? Apakah negara selalu mesti merupakan negara kelas? Apakah negara selalu sekedar alat dalam tangan kelas-kelas atas?
5. Apakah benar bahwa agama, moralitas masyarakat, filsafat nilai-nilai budaya dan sebagainya tidak lebih dan legitimasi ideologis struktur-struktur kekuasaan yang ada? Bagaimana agama dapat disalahgunakan—bukankah agama sebenarnya memiliki nilai dalam dirinya sendiri? Sampai di sini, kita tidak mengetahui jawaban Marx terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas.

4.3 Kritik terhadap Teori Media Kritis

John Lyle (2002) menyebutkan beberapa kritik tentang perspektif Teori Media Kritis:

1. Kurang memperhitungkan makna individu yang secara psikologis aktif memproduksi

- makna-makna (individu adalah makhluk aktif).
2. Model *strong effect* menolak resistensi individu. Padahal, menurut penelitian, ternyata khalayak media bersifat ‘kepala batu’: memiliki perhatian selektif, persepsi selektif, dan retensi selektif.
 3. Tidak menjelaskan bagaimana media membentuk dan mempengaruhi persepsi dan perilaku.
 4. Menyamakan pengaruh perubahan sikap dan pengaruh perubahan perilaku.
 5. Menganggap komunikasi bermedia merupakan satu-satunya kekuatan hegemoni.
 6. Terlalu menyederhanakan proses produksi media.
 7. Tidak memiliki bukti empiris dan historis yang memperkuat klaim yang dibuat.
 8. Menafikan peran positif media massa dalam menumbuhkan kesadaran politik dan sosial.
 9. Gagal membuktikan hubungan antara kekuatan masyarakat dan sistem. Penjelasan efek media terhadap khalayak lebih bersifat konspirasi daripada eksplanasi.

Kritik-kritik tersebut hendaknya menjadi catatan tersendiri, sekaligus tantangan bagi periset yang ingin mengaplikasikan teori *Media-Marxist* dalam penelitian-penelitian mereka. 

Catatan kaki:

- 1 (<http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELIMS/Strat/stadd.html#ALTHUSSER>)
- 2 (<http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell16.htm>)
- 3 (<http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html>, tanpa tahun).

Daftar Rujukan

- Althusser, Louis. tt. *Ideology and Ideological State Apparatuses*. <http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELIMS/Strat/stadd.html#Althusser>
<http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/dk/MARINFO.htm>
- Ash-Sadar, Baqir. 1991. *Falsafatuna (terjemahan Indonesia)*. Mizan: Bandung.
- Bertens, K. 1985. *Filsafat Barat Abad 20 (jilid 1*

- dan 2)*. Gramedia: Jakarta.
- Braye, Kerry, *Althusser's theory and the media*, <http://www.keltawebconcepts.com.au/ealthmed1.htm>, 2002
- Chandler, Daniel. tt. *Media Marxist Theory*. <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/marxism/marxism.html>
- Hainsworth, Stuart. 2000. *Gramsci's hegemony theory and the ideological role of the mass media*, <http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/>
- Hall, Stuart. 1997. http://www.colorado.edu/communication/meta_discourses/Theory/culturalstudies/sld002.htm,
- Hamelink, Cees J. 1983. *Cultural Autonomy in Global Communication : Planning National Information Policy*. Longman: New York.
- Lyle, John. 2002. *Critical media theory* <http://www.brocku.ca/commstudies/courses/2F50/html>
- Kellner, Douglas. *The Frankfurt School and British Cultural Studies: The Missed Articulation*, <http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell16.html>
- Kellner, Douglas. *Critical Theory Today: Revisiting the Classics*, <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html>
- Kellner, Douglas. *Critical Theory and the Crisis of Social Theory*, <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html>
- Littlejohn, Stephen W. 2001. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company: Belmont.
- Marcuse, Herbert. *One Dimensional Man*.
- McNair, Brian. 1999. *An Introduction to Political Communication*. Routledge: London.
- Suseno, Frans-Magnis. 1999. *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia: Jakarta.
- Underwood, Mick. 2003. *Mass Media: Cultural Effect*. <http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml>.
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Gramedia: Jakarta.

Wright, Charles R. 1985. *Sosiologi Komunikasi Massa* (terj. Lilawati Trimo dan Jalaluddin Rakhmat). Remadja Karya:Bandung.

